

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Easton, David. 1988. *Kerangka kerja Analisa Sistem Politik*. Bina Aksara: Jakarta
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller, Marra S. Sidney. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusa Media: Bandung
- Islamy, Irfan. 1988. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara: Jakarta
- _____. 2016. *Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka: Tangerang
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali: Jakarta
- Kantaprawira, Rusadi. 1987. *Aplikasi Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Bunda Karya: Jakarta
- Lindblom, Charles E. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan*. Erlangga: Jakarta
- Nugroho, Riant, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Gramedia: Jakarta
- _____. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik*. Graha Ilmu.: Yogyakarta
- Sugiarto, Dkk. 2003. *Teknik Sampling*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

- Winarno, Budi. 2001. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta
- Hastowiyono, Suharyanto. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUM Desa*. FPPD : Yogyakarta.
- Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*. FPPD: Yogyakarta.

Penelitian Terdahulu

- Ahmad Mursyid Juhansyah.2012. “Interaksi Stakeholder Dalam Perumusan Kebijakan Parkir Berlangganan di Sidoarjo”. Jurnal Politik Muda. 1(1) 2012-9. <http://journal.unair.ac.id/interaksi-stakeholder-dalam-perumusan-kebijakan-parkir-berlangganan-di-kabupaten-sidoarjo-article-4250-media-80-category-8.html>. Diakses pada 28 desember 2016
- Andi Misma. 2015. “Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur”. Journal Administrasi Negara. 3 (2) 2015 : 521 – 533
- Eko Budi Sulistio dan Dian Kagungan.2012. “Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan di Kota Bandarlampung”. Artikel Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=258362&val=7024&title=STUDI%20FORMULASI%20KEBIJAKAN%20PENATAAN%20SISTEM%20TRANSPORTASI%20PERKOTAAN%20DI%20KOTA%20BANDARLAMPUNG>. Diakses pada 28 Desember 2016.
- Muchammad Machfud. 2016. “Formulasi Kebijakan Penanggulangan HIV?AIDS dalam Perspektif Model System di Kabupaten Banyumas”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo.”Keberadaan BUM Desa Sebagai Penguat Ekonomi Desa Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=190372&val=6469&title=Keberadaan%20Badan%20Usaha%20Milik%20Desa%20\(BUMDES\)%20sebagai%20Penguatan%20Ekonomi%20Desa](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=190372&val=6469&title=Keberadaan%20Badan%20Usaha%20Milik%20Desa%20(BUMDES)%20sebagai%20Penguatan%20Ekonomi%20Desa), diakses pada 28 Desember 2016
- Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari. 2016. “Peran Pemerintah Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa Di Desa Bumiaji Kota Batu”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 5. No. 2 (2016) 2442-6962. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/289/316>. Dikses pada 12 januari 2017

Sumber lain:

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, pasal 1 (7)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (4)
3. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 5 ayat (1) poin b
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tertuang dalam pasal 5 (1)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bagian tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Tentang Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD pada pasal 7 bagian Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
8. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan dalam bab 1 pasal 1 poin 7 dan 8
9. Peraturan Desa Susukan Nomor 11 tahun 2015 tentang Pendirian BUM Desa pasal 2, pasal 3, pasal 5 (3)
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Usaha Milik Desa Susukan
11. Anggaran Dasar Badan Pengelola Sarana dan Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.